

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian peneulis pada sebelumnya, kerja sama Pemerintah Indonesia dan Malaysia, dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan, baik di wilayah lintas batas darat, laut, maupun udara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat adalah kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi 3 hal: pelatihan, sosialisasi penyebarluasan nota kesepahaman dan edukasi pertukaran informasi intelijen. Pada dasarnya, kejahatan terkait narkoba internasional adalah kejahatan yang tidak terbatas pada batas negara dan memiliki cakupan yang sangat luas, kompleks, dan terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Permasalahan ini melibatkan banyak aktor, tidak terkecuali negara sebagai aktor utama yang secara global paling berpengaruh dan berkaitan erat dengan kedaulatan masing-masing negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Perkembangan narkoba, khususnya peredaran dan penyelundupan hingga saat ini menyebar secara pesat, luas, dan masif. Bahkan pada berbagai jenjang dan strata masyarakat, dari bawah sampai atas, serta seluruh jenjang usia, mulai dari kalangan yang aktif hingga pasif. Namun yang lebih patut dipertanyakan adalah, kenaikan yang sulit untuk ditekan, terutama pada kalangan masyarakat yang masih tergolong produktif.

Bagi Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini merupakan negara transit dan tujuan distribusi karena masalah narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan, sebagai bentuk ungkapan penanganan, memilih dan memilah langkah-langkah tepat baik ditingkat nasional maupun internasional. melalui forum GBC Malindo salah satu bentuk langkah konkrit yang telah direalisasikan adalah membangun hubungan kerja

sama bilateral yang berlangsung lebih dari satu dekade.

Kerja sama bilateral yang terjalin memiliki arti penting dalam keberlangsungan dan keberadaan kedua negara karena letak wilayah yang sangat dekat, batas darat di wilayah Timur dan garis pantai yang membentang panjang di sisi barat, semuanya itu berpotensi akan masuknya segala bentuk kegiatan ilegal. Hal inilah yang semakin mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap terus berinovasi akan upaya-upaya mana sajakah yang bisa membasmi tuntas aktivitas penyelundupan narkoba, salah satunya adalah pelatihan bersama, patroli terkoordinasi, dan pertukaran pengetahuan seputar dunia intelijen guna mengembangkan kaidah pengamanan di kawasan perbatasan dari aktivitas penyelundupan narkoba.

Koordinasi dalam melakukan pelatihan bersama dilakukan melalui Forum Komite Umum Perbatasan Malaysia-Indonesia (GBC-Malindo) dengan Jawatan Kuasa Latihan Bersama Malaysia-Indonesia (JKLB MALINDO), bersama Latma Kekar Malindo berfokus pada batas darat, Latma Malindo Jaya berfokus pada wilayah perairan, dan Latma Elang Malindo bertempat di perbatasan ruang udara. Koordinasi pengerahan Tim Perancang Pelatihan Darat (TPLD), Tim Perencana Pelatihan Laut (TPLL), Tim Perencana Pelatihan Udara (TPLU), Staf Perancang Latihan (SPL) dan Kelompok Kerja *Safe and Rescue* (KK SAR). Kemudian, Operasi-operasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk *joint operation* dari upaya *border control*, diturunkan ke dalam bentuk kegiatan latihan dan evaluasi bersama di seluruh jalur (Akbar., dkk, 2019; 7).

Border control melalui forum *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC-MALINDO) telah terbukti efektivitasnya dalam melindungi perbatasan darat, laut, maupun udara lintas batas kedua negara. Kompetensi *relationship building* akan tetap terus dilakukan setiap tahun untuk membangun ikatan sosial atau jaringan

kontak sosial agar tetap dekat, guna mencapai tujuan pelaksanaan pekerjaan dan pengambilan keputusan penyelesaian. Pencegahan penyelundupan juga dilakukan dengan interoperabilitas personel sebagai bentuk melawan ancaman peredaran dan penyelundupan narkoba melalui hasil dari sistem pengawasan dalam berbagi gambaran situasi perairan lintas batas, memonitori aktivitas perairan dan darat untuk meneliti lebih dalam perkembangan situasi melalui instrumen elektronik modern. Kemudian, edukasi diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran informasi intelijen. Praktik dilakukan dengan pemetaan dan pengumpulan data intelijen darat, laut dan udara di sepanjang perbatasan yang dikoordinasikan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Malaysia (ATM).

Pertama, dalam melaksanakan program Latma bersama JKLB Malindo, dalam penindakan Latihan bersama ini, GBC Malindo dengan JKLB Malindo di kawasan darat melibatkan Tentara Nasional Darat (TNI AD), Tentera Darat Kerajaan Malaysia (TDM), dan Tim Perancang Latihan Darat (TPLD) dalam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pelatihan serta menyikapi penyelundupan narkoba yang datang dari Malaysia. Koordinasi di jalur laut dilakukan dengan melibatkan Tentara Angkatan Laut (TNI AL) dan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) serta Tim Perancang Operasi Laut (TPOL). Lalu, dibagian lintas batas udara, koordinasi dilakukan antara Tim Perancang Latihan Udara (TPLD), Angkatan Udara Nasional Indonesia (TNI AD), dan *Royal Malaysian Air Force* (TUDM) dalam pelaksanaan latihan bersama di perbatasan udara kedua negara.

Kedua, dalam upaya preventif pencegahan, GBC Malindo bersama COCC Malindo juga melibatkan beberapa pihak dibawah naungan untuk melaksanakan paktor atau operasi bersama. *mutual understanding, acknowledgement dan soft skill* juga dikembangkan dalam paktor ini. Di kawasan darat terdapat operasi bersama yang

dilakukan TPOD, TNI AD, dan TDM dengan nama operasi perbatasan darat Malindo. Kemudian, Patkor Optima sebagai bentuk wujud operasi bersama di jalur laut, melibatkan TPOL, TNI AL, TPK, dan KK SAR, sebagai wujud upaya menstabilkan kawasan perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu Selat Malaka. Pengetahuan akan udara juga dilakukan dalam Patkor Hanud Malindo, melibatkan TNI AD, TUDM, TPOU, TPK dan juga KK SAR sebagai wujud pengamanan kawasan udara di atas Selat Malaka dan Kalimantan Barat. Di sisi lain, TPOD melakukan pedoman kerja sama seperti tahap-tahap pelaksanaan operasi. Dalam program operasi tersebut, dilakukan peluncuran pesawat perang di atas perbatasan kedua negara. Anggota TNI dan ATM bersama turun langsung ke lokasi untuk memberikan pemahaman bahaya penyelundupan narkoba, sekaligus melaksanakan operasi bersama untuk mencegah masuknya penyelundupan narkoba ke perbatasan.

Kemudian, ketiga, pertukaran informasi intelijen dilakukan sebagai wujud aksi upaya bersama Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) dan Pasukan Tentera Kerajaan Malaysia (ATM) dengan menggali lebih dalam aliran barang selundupan dan suplai ilegal. Pertukaran pengalaman dilakukan dengan tetap non-intervensi dan saling kepercayaan kedua belah pihak dalam penyelidikan, penyergapan dan penetapan tersangka dan barang-barang bukti. Pertukaran informasi intelijen dimaksudkan untuk membongkar lebih dalam jaringan-jaringan penyelundupan, rute-rute penyebaran. Peran GBC Malindo sebagai aktor pada program pengamanan lintas batas, melalui kontribusi dan koordinasi pada perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengembangan, serta implementasi dengan berpedoman pada kebijakan Malindo yang telah ditetapkan, dan juga lembaga-lembaga dibawah naungan baik dari Pemerintah Malaysia maupun Indonesia sendiri untuk menjalankan sistem pengamanan lintas batas akan bahaya penyelundupan narkoba di dalamnya.

Meskipun sebelumnya telah dilaksanakan, tetapi bukan berarti telah sepenuhnya bersih habis sampai ke akarnya. Dibalik kasus yang terliput ke media, masih tidak sedikit kasus-kasus yang masih berjalan. Masyarakat menjadi sasaran yang paling rawan apalagi ditambah tawaran rupiah yang fantastis, ditambah kondisi yang masih tergolong miskin. Hal ini semakin membuat masyarakat berpotensi besar untuk masuk dan menjadi bagian di dalamnya. Penciptaan keamanan dengan tidak mengintervensi secara langsung, mendorong bergeraknya peran integral bagi keamanan perbatasan dalam kerja sama strategis ini. Peran integral adalah tentang bagaimana merealisasikan *Confidence Building Measure* sebagai bagian dari diplomasi kooperatif pertahanan yang dinilai dapat menekan intensitas konflik serta potensi-potensi konflik yang kemungkinan terjadi agar tidak berimbas pada instabilitas perbatasan di seluruh jalur (Akbar. dkk, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui forum GBC Malindo dalam mengatasi kasus penyelundupan narkoba yang datang dari Malaysia diselesaikan sesuai dengan kaidah hukum. Kaidah hukum disini sebagai pedoman agar tetap selaras ketika dalam proses pemutusan dan pemberantasan tindak penyelundupan narkoba secara langsung di perbatasan, baik darat maupun laut. Terlepas dari berbagai upaya, kendala pun juga kerap kali ditemukan dalam mencapai bentuk ideal kesepakatan kedua negara di forum tersebut, seperti kurang maksimalnya patroli yang berjalan, kurang jelinya aparat dalam memeriksa kasus penyelundupan, minimnya persediaan alat pendeteksi sebagai pengambilan langkah preventif menghindari kejahatan, fasilitas pendeteksi kejahatan yang masih sedikit di perbatasan dalam mendeteksi barang-barang bawaan pengguna jalu, menyebabkan tidak sedikit penyelundupan narkoba terjadi dan ditemukan di kawasan ini.

4.2 SARAN

Forum Komite Batas Bersama Malaysia dan Indonesia (GBC-Malindo) yang dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia telah berhasil berjalan dengan bekerja secara efektif dalam menangani permasalahan *drug trafficking and smuggling* yang ada di perbatasan kedua negara, agar negara sebagai aktor utama dapat segera menindaklanjuti kasus narkoba tersebut. Untuk pemerintah Malaysia, penulis berharap untuk membuat program lanjutan sebagai ekspansi upaya namun tetap berfokus terhadap permasalahan *drug trafficking and smuggling* agar penanganan kasus dapat lebih merata, dan tertata.

Di samping itu juga, diharapkan *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC-MALINDO) dapat mengevaluasi seluruh kegiatan latihan bersama, patroli terkoordinasi dan edukasi pertukaran informasi intelijen agar dapat berjalan lebih baik lagi dalam menanggulangi peredaran narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, seperti jumlah angka pasti kenaikan dan penggunaan jenis narkoba di perbatasan karena tidak semua kasus berhasil diliput dalam data *drug trafficking and smuggling* oleh forum *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC- MALINDO) secara langsung. Sehingga, bagi penelitian selanjutnya, akan lebih baik lagi untuk meneliti, memaparkan dan merilis data sesuai dengan tahun penelitian agar lebih jelas, bagi penelitian selanjutnya untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat perbatasan saja dapat lebih sadar akan bahaya peredaran dan penyelundupan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak erkecuali usia dan tingkat produktivitas masyarakat, mengingat sosial merupakan faktor penting merupakan elemen vital yang dapat membawa negara arah yang lebih baik lagi.